



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siti Asiyah binti Sujak, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sindujoyo XVI-A/19, RT 05 RW 02, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Lumpur, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Putri Rahmadani** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3525-LT-04062024-0009 tanggal 4 Juni 2024;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: Nama **Putri Rahmadani**, lahir di Gresik 17 Juni 2006 (umur 18 tahun 5 bulan 5 bulan), NIK 352516706060006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Penjaga toko), status Perawan, alamat di Jalan Sindujoyo XVI-A/19, RT 05 RW 02, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
dengan calon suaminya:
Nama **Gunawi bin Mardi**, lahir di Nganjuk 26 Maret 1985 (umur 39 tahun 8 bulan), NIK 3518172603850001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Hal 1 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta (Buruh Ias), status Duda cerai, alamat di Dusun Sanggrahan, RT 03 RW 03, Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Nomor B-326/Kua.13.19.01/Pw.01/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024, oleh karena saat ini anak Pemohon (calon istri) baru berumur 18 tahun 5 bulan 5 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta (Buruh Ias) dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak Pemohon tersebut, Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak Pemohon

Hal 2 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Dispensasi Kawin mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil Pemohon dan calon suami anak Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Putri Rahmadani**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Gunawi bin Mardi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan konseling pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan

Hal 3 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Putri Rahmadani, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 20 Mei 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Salafudin;
- Bahwa ia dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia bersikukuh hendak menikah dengan calon suami karena ia dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh las dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa ia harus segera menikah karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Gunawi bin Mardi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon suami anak Pemohon;

Hal 4 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 1 September 1996, statusnya jejak tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa karena ia dan anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri anak Pemohon serta ia telah bekerja sebagai Buruh las dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan kami atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon/calon besan bernama Mardi bin Radimin dan Satijem binti Samidi yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka yang bernama Muhammad Salafudin bin Sukayono akan menikah dengan anak Pemohon bernama Putri Rahmadani ;
- Bahwa anak mereka saat ini berusia 39 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon;

Hal 5 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak mereka telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh las dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa mereka dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak mereka dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ASIYAH, Nomor:3525164808840123, tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, SITI ASIYAH Nomor: 3525161511088069, tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama PUTRI RAHMADANI, Nomor: B-326/Kua.13.19.01/Pw.0/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan

Hal 6 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama PUTRI RAHMADANI, Nomor: 474.2/85/437.101.21/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumpur Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama GUNAWI, Nomor: 141/404/411.504.11/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanggrahan Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI RAHMADANI, Nomor: 352-LT-04062024-0009, tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI RAHMADANI, Nomor: 352-LT-04062024-0009, tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUNAWI, Nomor: 3618-23102024-0016., tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama PUTRI RAHMADANI, Nomor: 09.X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nelayan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 7 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama GUNAWI, Nomor: 445/249/437.52.04/2024, tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama PUTRI RAHMADANI dan GUNAWI, /2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

B.SAKSI:

Saksi 1. Rudi Hartono bin Salep, umur 39 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Besuki, RT.001 RW.014, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu calon menantu Pemohon.
- Bahwa benar Putri Rahmadani adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar Putri Rahmadani akan segera menikah dengan Gunawi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 39 tahun 8 bulan
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Putri Rahmadani dengan Gunawi;
- Bahwa Putri Rahmadani tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Hal 8 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Rahmadani tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Gunawi dengan Putri Rahmadani;
- Bahwa Gunawi dengan Putri Rahmadani sudah siap untuk berumah tangga karena Putri Rahmadani siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Gunawi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Gunawi sudah bekerja sebagai Buruh las dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Saksi 2. Alfiah Andriani binti Ahmad Acho, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Harun Thohir Gg. 46 No. 134 RT.003 RW.002 Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi calon menantu Pemohon.
- Bahwa benar Putri Rahmadani adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar Putri Rahmadani akan segera menikah dengan Gunawi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 39 tahun 8 bulan
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan;

Hal 9 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Putri Rahmadani dengan Gunawi;
- Bahwa Putri Rahmadani tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Putri Rahmadani tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Gunawi dengan Putri Rahmadani;
- Bahwa Gunawi dengan Putri Rahmadani sudah siap untuk berumah tangga karena Putri Rahmadani siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Gunawi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Gunawi sudah bekerja sebagai Buruh las dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 10 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Ayah serta Ibu calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang bernama Putri Rahmadani, umur 18 tahun 5 bulan dengan calon suaminya bernama Gunawi bin Mardi, umur 39 tahun 8 bulan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Hal 11 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair*), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.11, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim menilai bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Fotokpi Surat Pengantar Nikah

Hal 12 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Putri Rahmadani dan Surat Pengantar Nikah atas nama Gunawi yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan Calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Rahmadani, maka terbukti bahwa anak yang bernama Putri Rahmadani adalah anak dari Pemohon dan PemohonI yang lahir pada tanggal 17 Juni 2006 atau saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gunawi, maka terbukti bahwa anak yang bernama Gunawi adalah anak dari Mu'an dan Faridah Zunanik yang lahir pada tanggal 1 September 1996 atau saat ini telah berusia 39 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti P.10 dan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Putri Rahmadani dan Fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama Gunawi yang kedua Surat Keterangan Sehat dikeluarkan oleh Puskesmas Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus Perawan dan Jejak dan keduanya berteman sejak kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Pemohon dan bukti-bukti P.1 sampai P.11 serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Putri Rahmadani.
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal 13 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon berusia umur 18 tahun 5 bulan (lahir pada tanggal 17 Juni 2006) dan telah akil baligh;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berkenalan sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah Perawan sedangkan calon suami anak Pemohon adalah Jejak;
- Bahwa, anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak orang tua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 18 tahun 5 bulan 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim, bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77, 78, 79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 5 bulan 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 14 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim Tunggal, menyegerakan perkawinan anak Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang artinya:

" Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri Rahmadani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Gunawi bin Mardi;

Hal 15 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	22.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal, Pen. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Gs